

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Hindia-Belanda membedakan penduduknya menjadi tiga golongan yaitu Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Tetapi pemerintah lebih mengutamakan penduduk berkulit putih. Penduduk lainnya terutama etnis Tionghoa disamakan dengan Bumiputera dari segi kedudukan dimata hukum, hak yang dibeda-bedakan antar golongan dan hak tersebut ditetapkan dalam beberapa Undang-Undang (UU). Penduduk kolonial, menganggap bahwa penduduk Tionghoa lebih rendah dari bangsa Eropa sehingga penduduk etnis Tionghoa mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan sehingga menyinggung perasaan dan membuat mereka merasa tidak nyaman.<sup>1</sup>

UU *Regerings Reglement* pada tahun 1854, membuat masyarakat di Hindia-Belanda terbagi menjadi beberapa golongan seperti Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera. Pada dasarnya penggolongan ini memiliki tujuan untuk menata penduduk agar lebih baik, tetapi selang beberapa waktu tidak sesuai dengan tujuan dari dasar UU *Regerings* karena menjadi sistem deskriminasi. Bagi pemerintah melalui UU ini, mereka berperan dalam mengontrol golongan yang berstrata lebih rendah maupun membantu perekonomian.

---

<sup>1</sup> Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 11

Penduduk Timur Asing akhirnya digolongkan oleh pemerintah Hindia-Belanda agar tidak mengganggu sistem pemerintahan yang sudah ada. Pemerintah memiliki tujuan dalam penggolongan tersebut karena adanya beberapa kekhawatiran salah satunya gabungan antar etnis yang nantinya akan menentang mereka. Maka dari itu muncul daerah tempat tinggal khusus yang ditempati oleh etnis tertentu seperti daerah Pecinan dan Kampung Arab. Pada awalnya mereka memiliki hak yang sama sehingga dapat bergabung dalam dunia politik, tetapi dibawah pemerintah Belanda posisi golongan Timur Asing mereka tidak sampai pada bidang politik. Hal tersebut juga dirasakan oleh golongan Tionghoa menjadi masyarakat kelas kedua akan rentan akan serangan. Contoh ketika mereka menjadi pemberi hutang kerap dicap buruk sebagai ‘lintah darat’ dan tukang ribah dengan dalih agama. Pemerintah kolonial juga berprasangka bahwa kehadiran mereka akan membedah Pan Islamisme yang akan merusak tatanan.<sup>2</sup>

Pertengahan abad ke-19, etnis Tionghoa masih acuh dengan masalah politik dan identitas mereka. Kegiatan mereka yang padat dalam sektor ekonomi, status mereka masih menjadi warga asing, menjadi penyebab mereka tidak mau ikut campur dalam bidang politik. Berjalannya waktu pada akhir abad ke-19, munculah kesadaran untuk meninjau identitas mereka sebagai bangsa Tionghoa. Sehingga muncul beberapa perkumpulan Tionghoa dengan kesamaan suku, marga, maupun tujuan salah satunya untuk mencari

---

<sup>2</sup> Afkar Aristoteles Mukhaer, *Ketika Orang Arab dan Tionghoa Membuat Resah Pemerintah Kolonial*, diakses melalui [nationalgeographic.grid.id](http://nationalgeographic.grid.id) pada Senin, 22 September 2021.

solusi dari masalah yang dihadapi oleh etnis Tionghoa. Perkumpulan bersifat politik juga muncul dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan menyangkut posisi masyarakat etnis Tionghoa.<sup>3</sup>

Perhimpunan maupun organisasi mulai banyak terbentuk khusus untuk penduduk etnis Tionghoa di Surabaya. Kehadiran beberapa organisasi ini menggambarkan adanya kesadaran etnis yang tinggi menurut etnis Tionghoa. Lantaran adanya faktor politik yang menghalangi pembauran mereka dalam suatu organisasi sehingga penduduk etnis Tionghoa dikesampingkan dari organisasi lokal yang bersifat pergerakan. “Politik Pecinan” yang dilakukan oleh pemerintah Belanda mengakibatkan rasa persaudaraan semakin kuat diantara para pendatang yang sesungguhnya memiliki perbedaan subkultur. Tempat perantauan mereka merasa satu dan meleburkan diri menjadi bagian dari bangsa Cina. Kenyataan tersebut telah mendorong mereka untuk mendirikan organisasi secara terpisah terutama dalam organisasi sosial, ekonomi dan politik. Organisasi yang mereka bentuk menjadi alas perjuangan untuk menghadapi kebijakan pemerintah kolonial Belanda dijalankan pada etnis Tionghoa. Organisasi sangat berpengaruh penting dalam dunia politik etnis Tionghoa, dimana awal dari tumbuhnya nasionalisme mereka dimulai dari dibentuknya organisasi yaitu Tiong Hoa Hwee Koan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Kosasih, *Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta, 2013) Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah, No.1, Vol.1, Maret 2013, hlm.48

<sup>4</sup> Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya, 1910-1946*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 5.

Etnis Tionghoa di Hindia-Belanda merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang sudah diikrarkan dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Mereka menyatakan bahwa etnis Tionghoa harus menyatukan diri dengan Gerakan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan. Tahun 1932, mereka membentuk PTI. Orientasi dan pandangan politik mereka diwakili oleh harian *Sin Tit Po*.<sup>5</sup>

Partai Tionghoa Indonesia merupakan organisasi politik etnis Tionghoa yang bertujuan untuk membantu Indonesia agar berkembang dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik menuju keadaan yang bisa dinikmati oleh rakyat menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban sama. Pihak yang dimaksudkan untuk mencapai tujuannya dengan memperkuat status ekonomi peranakan Tionghoa, berpartisipasi dalam perjuangan politik di Indonesia dan bekerjasama dengan partai politik Indonesia yang sederajat dalam tujuan. Karena hukum pemerintah Hindia-Belanda hanya mengizinkan penduduk Belanda untuk terlibat dalam politik, oleh karena itu hanya orang Tionghoa kelahiran pada masa pemerintahan Hindia-Belanda yang mengaku sebagai anggota biasa PTI (Partai Tionghoa Indonesia). Tidak dengan orang Tionghoa ‘asing’ hanya bisa menjadi anggota asosiasi tanpa hak bersuara.<sup>6</sup>

Tujuan Partai Tionghoa Indonesia untuk membantu Indonesia mengembangkan ekonomi, sosial, dan politik agar mampu menuju keadaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi

---

<sup>5</sup> Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Transmedia, 2008) hlm.444.

<sup>6</sup> Saripa Haini Jumita, *Peranan Pers Tionghoa Peranakan di Surabaya dalam Pergerakan Nasional 1902-1942*, (Jember, 2015), hlm 12

persamaan hak dan kewajiban. Mencapai tujuannya dengan memperkuat status ekonomi Peranakan Tionghoa, berpartisipasi dalam perjuangan politik di Indonesia dan bekerjasama dengan partai politik Indonesia yang satu tujuan. Karena hukum pemerintah Hindia-Belanda hanya mengizinkan penduduk Belanda untuk terlibat dalam politik, oleh karena itu hanya orang Tionghoa kelahiran pada masa pemerintahan Hindia-Belanda yang mengaku sebagai anggota biasa PTI (Partai Tionghoa Indonesia). Tidak dengan orang Tionghoa ‘asing’ hanya bisa menjadi anggota asosiasi tanpa hak bersuara.<sup>7</sup>

Pada akhir abad ke-20, menjadi titik awal eksistensi beberapa tokoh Marga Tan salah satunya Tan Ling Djie dan Tan Ping Lee dalam pers. Menjadi pemimpin dalam sebuah surat kabar maupun dewan redaksi dalam suatu surat kabar. Tidak hanya eksistensi para tokoh juga dimulai dari banyaknya kepemilikan surat kabar oleh para tokoh Tionghoa. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan surat kabar menjadi salah satu media politik bagi para penduduk etnis Tionghoa maupun organisasi Tionghoa. Surat kabar dijadikan sebuah media untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam hal politik pada masa Hindia-Belanda. Penduduk Tionghoa menjadikan surat kabar sebagai media untuk mengkritik para pemerintah kolonial. Mereka mengembangkan surat kabar Tionghoa, mendirikan surat kabar baru agar para penduduk kota Surabaya tidak hanya termakan pada satu surat kabar. Salah satunya Partai

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Tionghoa Indonesia yang menjadikan surat kabar Sin Tit Po sebagai media orientasi maupun pandangan terhadap politik.<sup>8</sup>

Berbagai stigma negatif yang terbentuk untuk melawan kolonial Belanda menjadikan penduduk Tionghoa berada diposisi sulit. Beberapa hal yang berkaitan dengan etnis Tionghoa selalu dipermasalahkan baik mengenai agama, budaya maupun kewarganegaraan mampu menutupi peran serta kontribusi etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Hal tersebut tidak diketahui pasti sengaja disembunyikan atau memang tidak dianggap sama sekali. Pemerintah Indonesia dan beberapa tokoh masyarakat masih terpengaruh dengan ‘komunis phobia’, sehingga penduduk Tionghoa sebagai pelaku sejarah dianggap menganut paham komunis apapun perannya dan jasanya harus dihapus dari sejarah. Beberapa tokoh ‘sayap kiri’ dalam Marga Tan tersebut adalah Tan Ping Tjiat dan Tan Ling Djie. Hubungan antara beberapa aktifis sering kali digunakan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Artinya perlawanan yang dilakukan tidak secara frontal melainkan melalui media surat kabar. Sin Tit Po, Sin Po, Soeara Poeblik, dan Soeara Oemoem merupakan surat kabar yang cukup keras dalam mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda, selain surat kabar *Proletar* (milik PKI kota Surabaya) dan *Pembela Rakjat*.

Salah satu keluarga besar etnis Tionghoa yang memegang peran penting dalam politik organisasi penduduk Tionghoa di Surabaya adalah Marga Tan.

---

<sup>8</sup> Iyus Jayusman, dkk, *Eksistensi kaum Tionghoa dalam Dunia Pers di Hindia-Belanda tahun 1869-1942*, (Universitas Siliwangi, 2021), hlm. 54. Vol.4 Tahun/ISSN: 27147908.

Tidak diketahui pasti awal kedatangan Marga Tan namun diketahui bahwa pertengahan abad XVIII *Sentiong* (kuburan baru) terletak di jalan slompretan (pasar bong) yang merupakan kawasan pecinan. Kuburan pertama yang terbaca batu nisannya ialah Tan Heguan yang lahir pada tahun 1730 dan meninggal pada tahun 1778.<sup>9</sup>

Salah satu tokoh yaitu Tan Hie Sioe (lahir pada tahun 1870 dan diangkat sebagai letnan tahun 1906), keluarganya telah ada di Jawa selama empat generasi, mengelola pegadaian, memiliki perkebunan tembakau yang besar dan juga memperoleh konsesi dari pemerintah untuk pengolahan kayu. Tan Hie Sioe menempati posisi sebagai letnan. Konsensi dari pemerintah secara langsung dapat menjelaskan bahwa pembagian pangkat yang diterima menunjukkan adanya kekuasaan ganda. Posisi *Chinese Mayor, Captain, dan Lieutenant Sourabaya* dipegang oleh keluarga Tan. Hal ini tercermin pada kedua aliansi ekonomi dalam masyarakat dan strategi politik mempertahankan pertimbangan oleh pemerintah kolonial, yang dipilih sebagai “pejabat” menurut kontribusi mereka, sebagai keputusan yang dilihat untuk pembangunan ekonomi mereka.<sup>10</sup>

Hubungan antara marga Tan dengan marga lainnya juga terjalin baik seperti halnya pada Letnan Tan Thwan Hing. Ia merupakan seorang menantu dari The Boen King dan menjadi salah satu komisaris dari perkumpulan *The Sie Siauw Yang Tjoh Biau*. Tan Thwan Hing juga menjadi komisaris dari perkumpulan tersebut karena The Boen King tidak memiliki anak laki-laki,

---

<sup>9</sup> Diakses melalui geni.com pada tanggal 21 April 2022 pukul 22:19.

<sup>10</sup> Handinoto, *op.cit.*, hlm. 95

Tan Thwan Hing merupakan seorang Letnan Tionghoa menduduki posisi sebagai komisaris dalam perkumpulan *The Sie Siauw Yang Tjoh Biau*.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas tokoh-tokoh Tionghoa khususnya Marga Tan telah terlibat dalam bidang politik sejak masa kolonial, sehingga menarik untuk menuliskan bagaimana kehidupan politik Marga Tan pada masa itu. Beberapa tokoh Marga Tan ikut menjadi keanggotaan surat kabar Tionghoa di Surabaya. Tulisan ini akan menguraikan bagaimana orang-orang Marga Tan ikut serta dalam pembentukan organisasi politik etnis Tionghoa pada masa kolonial dan aktivitas politiknya pada masa tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masyarakat etnis Tionghoa di Jawa memiliki pengaruh yang cukup besar untuk kehidupan organisasi politik di kota Surabaya, salah satu marga yang memegang peran penting dalam bidang politik adalah Marga Tan. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kehidupan politik penduduk Tionghoa khususnya Marga Tan di Surabaya timbul sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan organisasi politik Marga Tan pada masa pemerintah kolonial Belanda di Surabaya pada tahun 1892-1950?
2. Bagaimana partisipasi Marga Tan dalam pembentukan surat kabar Sin Tit Po sebagai media politik etnis Tionghoa di Surabaya pada tahun 1892-1950?

---

<sup>11</sup>Bima Satria Utama. *Marga The: Keluarga Tionghoa Terkemuka di Surabaya 1834-1937*. (Universitas Airlangga, 2020) hlm. 39.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan awal kontribusi dalam Marga Tan, dimana keluarga Tan telah kuat di Jawa Timur selama dua puluh tahun terakhir dari abad XVII dan tiga puluh tahun dari abad XVIII. Lalu, memberikan gambaran dari segala aspek kehidupan baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, khususnya politik yang utama dengan menghubungkan keberadaan yang ikut andil dalam segala aspek kehidupan tersebut.

Penelitian ini juga memiliki manfaat yang diharapkan dapat menjadi referensi dan media informasi mengenai perpolitikan etnis Tionghoa di suatu daerah sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran serta pengembangan studi sejarah. Manfaat lainnya, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang studi perpolitikan maupun segala aspek kehidupan dari penduduk Tionghoa pada tahun 1892-1950.

### **1.4 Batas dan Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mengambil ruang lingkup atau batasan spasial di Kota Surabaya. Daerah Indonesia Timur yang memiliki penduduk Tionghoa cukup banyak. Selain itu berkaitan dengan keberadaan keluarga Tan yang menjadi peran penting bagi penduduk Tionghoa di Surabaya. Dari segala aspek kehidupan yang ada di kota Surabaya Marga Tan memiliki posisi penting di dalamnya.

Batasan Temporal dalam penelitian ini pada tahun 1892-1950. Pada tahun 1892 menjadi batasan awal dalam penelitian ini karena tahun tersebut merupakan awal munculnya tokoh Marga Tan dalam dunia politik. Batasan

akhir dalam penelitian ini pada tahun 1950 karena kemunduran yang dialami tokoh-tokoh Marga Tan dalam dunia politik salah satunya terlihat dari kemunduran mereka dalam keanggotaan Partai Komunis Indonesia (PKI).

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini sumber tertulis yang digunakan secara garis besar mengenai peran etnis Tionghoa dalam bidang politik, selain itu beberapa literatur dan referensi setema yang digunakan dengan membahas peran beberapa marga terkenal di Surabaya. Sepeti buku berjudul *Komunitas Cina dan Perkembangan Kota Surabaya (Abad XVII Sampai Pertengahan Abad XX)*, karya Handinoto<sup>12</sup>. Buku ini secara garis besar menjelaskan perkembangan komunitas Surabaya, beberapa marga yang terkenal di Surabaya seperti Tjoa, The, Han, mereka berhasil mempertahankan posisi selama tiga abad (XVIII, XIX, sampai XX), meskipun beberapa kekacauan terjadi dalam bidang ekonomi, mereka tetap menjaga rumah abu yang dijadikan sebagai pertahanan mereka. Tidak hanya ketiga marga tersebut, ada Marga Tan yang tidak dijelaskan secara gamblang namun memiliki peran dalam beberapa bidang seperti pendidikan, politik, ekonomi maupun arsitektur.

Kedua, buku berjudul *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Karya Andjarwati Noordjanah,<sup>13</sup> yang berisikan tentang etnis Tionghoa (Pecinan) di Surabaya dari berbagai aspek kehidupan. Dimana Surabaya menjadi pusat

---

<sup>12</sup> Handinoto. *Komunitas Cina dan Perkembangan Kota Surabaya (Abad XVII sampai Pertengahan Abad XX)*, (Yogyakarta: Ombak, 2015).

<sup>13</sup> Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya, 1910-1946*, (Yogyakarta: Ombak, 2010)

perdagangan di daerah Indonesia Timur yang mempunyai penduduk Tionghoa yang cukup banyak. Meskipun jumlah klintengnya tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa tetapi dalam buku ini dijelaskan di Surabaya memiliki tiga klinteng leluhur atau rumah Abu, justru ketiga rumah abu tersebut dari keluarga terkemuka. Peran Pecinan di Surabaya sering disebut sebagai pusat pertumbuhan bagi lingkungannya, sangat sedikit tulisan tentang daerah tersebut di Indonesia. buku ini menekankan tentang sejarah Pecinan yang seiring berkembang dengan perkembangan kota Surabaya. selain itu, dalam buku ini dijelaskan pula komunitas Tionghoa yang ada di Surabaya (keluarga/marga) dalam berbagai aspek kehidupan seperti peran mereka dalam (perdagangan), politik ataupun organisasi, maupun pendidikan. Disertai dengan foto tokoh yang memiliki peran penting untuk kota Surabaya dan foto situasi pada saat itu.

Ketiga, buku berjudul *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* karya Leo Suryadinata.<sup>14</sup> Buku ini menguraikan kegiatan politik etnis Tionghoa dan perkembangan, organisasi serta partai politik. Dimana pada rentang waktu 1917-1942, diselenggarakannya Konferensi di Semarang dimana konferensi yang pertama kalinya penduduk etnis Tionghoa mengadakannya di Jawa. Sebagian besar yang ikut serta didalamnya ialah golongan peranakan. Setelah konferensi tersebut, satu aliran politik yang dikenal sebagai kelompok Sin Po muncul dengan cepat menjadi menonjol. Pada tahun 1942 memperlihatkan

---

<sup>14</sup> Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986).

betapa pendudukan Jepang atas pulau Jawa berikut penindasan atas kegiatan politik penduduk Tionghoa peranakan. Serbuan Jepang membawa perubahan baik kepada penduduk Indonesia maupun Tionghoa. Masa kebangkitan, pergerakan maupun aliran politik terurai dibuku ini dimana terdapat tiga aliran politik utama yaitu Sin Po, Chung Hwa Hui, dan Partai Tionghoa Indonesia.

Keempat, buku berjudul *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia* karya dari Leo Suryadinata.<sup>15</sup> Buku ini membahas tentang nasionalisme penduduk Tionghoa di Indonesia, melalui beberapa media seperti pers yang berkembang pada saat itu dan setiap surat kabar memiliki orientasinya masing-masing seperti Sin Po yang berorientasi ke Tiongkok ataupun Sin Tit Po dan Soerara Poeblik berorientasi ke Indonesia. Perkembangan dalam beberapa surat kabar juga dibahas seperti Li Po serta perniagaan. Terdapat beberapa polemik yang terjadi dalam suatu organisasi yang menjadikan media surat kabar sebagai politik.

## 1.6 Kerangka Konseptual

Identitas ialah tentang seseorang mendefinisikan pribadinya. Melalui maupun menggunakan identitas dapat menjelaskan kesadaran diri yang ditemukan pada setiap individu. Ia bersifat performatif, bukan berdasarkan karakteristik esensial tetapi lebih kepada performa atas dasar ekspetasi budaya. Mely G. Tan dalam makalahnya menguraikan bahwa identitas etnis Tionghoa di Indonesia memiliki rentang variasi diujungnya merupakan

---

<sup>15</sup> Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2010)

masyarakat etnis Tionghoa totok yang berakulturasi dengan budaya lokal seperti kaum peranakan. Kemudian ujung lain dari rentang ini ialah para etnis Tionghoa yang masih berorientasi ke negara aslinya yaitu Tiongkok, awalnya menempuh pendidikan Tionghoa, kemudian menjadi warga Indonesia melalui naturalisasi. Kedua ujung ini mayoritas ditempuh oleh sebagian besar peranakan etnis Tionghoa, dengan secara budaya berorientasi kepada Indonesia, berbicara menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa lokal, dan memiliki pengetahuan minim mengenai budaya Tionghoa.

Dalam etnis Tionghoa pemberian nama merupakan identitas yang terlihat jelas berbeda dengan nama Barat. Dimana perbedaannya terletak pada posisi nama keluarga (marga) di depan. Susunan nama Tionghoa terdiri dari tiga atau dua suku kata dengan maksimal memiliki empat kata. Sama halnya seperti etnis lainnya yang menjadikan nama sebuah hal penting, begitu juga dengan etnis Tionghoa.

Melalui nama terselip harapan orang tua kepada anak mereka seperti orang tua mengharapkan anaknya berbudi luhur, memiliki intelektual dan kehidupan yang baik, sehat serta memiliki penampilan elok rupawan. Terkadang pemilihan nama juga mengamati unsur astrologi yaitu memperhatikan waktu kelahiran, terdapat lima unsur yaitu logam, kayu, air, api dan tanah yang mewakili kelahiran seorang anak. Pemberian nama juga perlu diperhatikan penulisan, cara baca, dan keseimbangan *ying* dan *yang* (Qiming). Bagi etnis Tionghoa melalui nama memperlihatkan relasi

kekeluargaan, pada umumnya sesama saudara kandung memiliki suku kata yang sama (Mingzi).<sup>16</sup>

Marga Tan (*chen*), berasal dari Negeri Tan di Provinsi Holm, Huai Yang (saat ini bernama Tan Chou). Negeri Tan adalah hadiah yang diberikan Raja Tjiu Bu kepada Raja Sun, yang merupakan keturunan Chong Hoa karena telah berjasa terhadap negara. Puncak kejayaan Kerajaan Tang tercapai saat Tan Goang Kong menjadi panglima perang. Atas jasanya tersebut, Tan Goang Kong mendapatkan gelar kehormatan Kai Tjiang Seng Ong artinya orang suci yang membuka Zhangzhou (kota paling selatan di provinsi Fujian).<sup>17</sup>

Asal mula Marga Tan atau dalam bahasa Mandarin disebut Chen [陈] merupakan Marga Tionghoa terbesar ke-5 di daratan Cina. Bahkan di Singapura, Hongkong, dan Makau, Marga Tan merupakan marga dengan warga terbanyak atau menduduki urutan pertama diantara marga lainnya. Selain dipakai oleh warga Tionghoa, Marga Tan (Chen) juga dipakai oleh warga Vietnam dan Korea, sebutan Marga Tan berbeda-beda tergantung dengan dialek dan bahasa yang dipergunakan. Beberapa sebutannya antara lain Tan (Teoche dan Hokkien), Chan (Kantonis), Chin (Hakka).<sup>18</sup>

Menurut Deliar Noer (1983:6) Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi, mengubah atau

---

<sup>16</sup> Suharyo, *Pola Nama Masyarakat Keturunan Tionghoa*, (Universitas Diponegoro, TT) hlm 1.

<sup>17</sup> Erniwati, *Identitas Etnis Tionghoa Padang Masa Pemerintah Hindia Belanda*, (Universitas Negeri Padang, 2019) Vol. 11 No. 2 Juni 2019:185-201. Hlm. 195.

<sup>18</sup> Diakses melalui dinaviriya.com pada 9 Februari 2021 pukul 20:21.

mempertahankan, suatu susunan masyarakat. Para ahli yang berpendapat bahwa kemajuan suatu negara ditentukan oleh sikap dan budaya rakyat atau warga negaranya yang terbiasa berperilaku demokratis, kritis, dan partisipatif. Hal ini merupakan salah satu indikator determinasi dimana suatu negara dapat dikatakan negara demokratis. Perilaku demokratis merupakan pencerminan dari budaya politik nasional atau negara. Suatu masyarakat membutuhkan budaya politik yang kuat agar dapat memajukan stabilitas negara.

Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik. Budaya politik lebih kepada sifat atau karakter berpolitik yang berkembang dalam masyarakat dengan menilai maupun memiliki pandangan terhadap suatu objek politik dan proses sosial yang bersifat khusus. Budaya politik merupakan sebuah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, serta norma kebiasaan yang dihayati oleh sejumlah anggota masyarakat di dalam kehidupannya.<sup>19</sup>

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik tersebut. Dengan kata lain, berbagai negara mempunyai pola keyakinan, nilai-nilai dan sikap politik yang sangat berbeda dan didalam negara-negara tersebut elemen-elemen budaya politik terbentuk oleh

---

<sup>19</sup> Herning Suryo, *Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan*, 2015, Transformasi No.27 Tahun 2015 Volume I halaman 1-47. Hlm 32.

pengalaman hidup, pendidikan, dan kelas sosial. Selain itu, disebutkan juga bahwa budaya politik sebagai keyakinan, sikap, nilai, ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara dan peran dari masing-masing individu.<sup>20</sup>

Terdapat dua pengertian secara konseptual yang berbeda untuk istilah organisasi (*organization*) sebagai kata benda, merupakan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, lain istilahnya dengan pengorganisasian (*organizing*) sebagai kata kerja, merupakan suatu proses dan serangkaian aktivitas dilakukan secara sistematis sebagai upaya mengembangkan organisasi. Menurut Mathis dan Jackson, organisasi merupakan kesatuan sosial dari kelompok manusia dengan saling berinteraksi sesuai pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai kesatuan yang memiliki tujuan tertentu. Organisasi menjadi salah satu sistem politik. Menurut Morgan semua organisasi mengikuti “sistem pemerintahan” terbagi menjadi enam jenis yakni, otokrasi, birokrasi, teknokrasi, otoriter, demokrasi perwakilan, maupun demokrasi langsung. Jenis sistem politik tersebut membutuhkan empat belas sumber daya kekuasaan seperti, integrasi simbolis, penyeimbang manajemen, manajemen jenis kelamin, tindakan ekologi, karisma pribadi, budidaya aliansi, manipulasi teknologi, penyangga ketidakpastian, lingkungan manajemen, penguasaan informasi, pengaruh keputusan, pendelegasian peraturan, sumber daya control, dan legitimasi. Berdasarkan enam jenis struktur dan empat belas

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.32

sumber daya kekuasaan, Morgan menyatakan adanya perbedaan luas dalam kekuasaan politik penting untuk para pemimpin mengingat bahwa organisasi merupakan koalisi yang terdiri dari “kelompok dengan kepentingan berbeda-beda namun satu tujuan”.<sup>21</sup>

### 1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Kehidupan Politik Marga Tan di Surabaya Pada tahun 1892-1950”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Istilah metode dalam arti metode sejarah hendaknya diartikan yang lebih luas, tidak hanya pelajaran mengenai analisa kritis saja, melainkan juga meliputi usaha sintesa daripada data yang ada sehingga menjadi penyajian dan kisah sejarah yang dapat dipercaya. Definisi metode sejarah sebagai Langkah-langkah dalam metode sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi data, dan historiografi.

Pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan data berupa buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini. Dalam teknik pengumpulan data (Heuristik), penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu mencari sumber dengan mengunjungi berbagai perpustakaan, salah satunya Perpustakaan Medayu dimana ditemukan beberapa buku dan koran-koran lama. Selain mengunjungi perpustakaan pengumpulan data juga dilakukan melalui online, dengan mengunjungi

---

<sup>21</sup> Drs.Machmoed Effendhie, diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ASIP420902-M1.pdf> pada tanggal 12 mei 2022 pukul 15:19.

perpustakaan dan arsip website resmi. Seperti delpher yang ditemukan beberapa arsip koran, dan lain sebagainya.

Setelah selesai mengumpulkan sumber sejarah, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber terhadap data yang dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan sumber. Langkah ini disebut kritik sumber. Kritik sumber dilakukan terhadap sumber pertama, yakni menyangkut verifikasi atau pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber yang dimaksudkan Kritik sejarah adalah kritik seorang peneliti terhadap sumber-sumber sejarah yang diperoleh. Salah satunya mengenai buku Komunitas Cina dan Perkembangan Kota Surabaya (Abad XVIII sampai pertengahan Abad XX) Kritik sumber mempunyai dua bentuk yang kritik intern dan kritik ekstern.

Kritik Ekstern ingin menguji otentisitas (keaslian) suatu sumber, agar di peroleh sumber yang sungguh-sungguh asli dan bukan tiruan atau palsu. Sumber yang asli biasanya waktu dan tempatnya diketahui. Makin luas dan makin dapat dipercaya pengetahuan kita mengenai suatu sumber, akan makin asli sumber itu. Dalam buku ini yang menjadi salah satu sumber, keasliannya dibuktikan dengan adanya lampiran gambar yang bersifat dokumentasi pribadi. Pembahasan yang disampaikan sangat jelas sehingga dalam setiap aspek dan perkembangan etnis Tionghoa di Surabaya tergambarkan keadaan pada saat itu disetiap kalimatnya. Tetapi, dalam pembabakan waktu yang digunakan dalam buku ini alurnya kurang runtut sehigga sedikit membingungkan.

Kritik Intern berkenaan dengan seleksi persoalan asli (otentik) atau setidaknya sesuatu tentang sumber bersifat keaslian darinya (*authenticity*). Kritik Intern berkenaan dengan persoalan kredibilitas dari sumber yang didapat, apakah dapat dipercaya atau tidak, oleh karna itu, kritiknya lebih banyak berupa isi tentang narasi yang disampaikan sumber tersebut. Dalam keaslian sumber dapat dipercaya dengan dilampirkannya gambar-gambar yang bersifat koleksi pribadi. Tetapi, buku ini cenderung baru yang diterbitkan pada tahun 2015. Arsip yang terlampir di media cetak seperti koran lama yang dapat dianggap sebagai sumber primer dapat membantu dalam mengukur keaslian sumber-sumber lain.

Pada tahapan interpretasi ini, penulis berusaha menafsirkan data-data yang berkaitan dengan Marga Tan serta perannya dalam kehidupan politiknya di Surabaya pada tahun 1892-1950 dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini penulis berusaha menyusun tulisan dalam bentuk sejarah sebagai peristiwa, penulis juga berusaha menyajikan hasil data penelitian sebaik mungkin dengan menuliskan data yang diperoleh secara keseluruhan berdasarkan sistem penulisan ilmiah dari awal hingga akhir sehingga fakta yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini telah dilakukan dengan berbagai tahap sehingga mudah dipahami dan diikuti permasalahannya yang telah dikemukakan oleh penulis, sistematika penulisan secara singkat sebagai berikut:

Bab I meliputi latar belakang masalah yang akan dibahas dan dijadikan sebagai objek penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II meliputi gambaran umum yang secara garis besar membahas tentang komunitas Tionghoa di Surabaya terbagi menjadi beberapa sub bab. Pertama, komunitas Tionghoa di Surabaya yang akan dibahas dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial dan ekonomi. Kedua, keikutsertaan etnis Tionghoa pada kegiatan politik pada masa kolonial. Ketiga, Latar belakang Marga Tan dalam dunia politik masa kolonial.

Bab III berisi pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang secara garis besar membahas tentang kontribusi Marga Tan dalam organisasi politik terbagi menjadi beberapa sub bab. Pertama, membahas mengenai kontribusi yang diberikan oleh beberapa tokoh Marga Tan dalam organisasi etnis Tionghoa, yang secara langsung beberapa tokoh Marga Tan ikut andil di dalam organisasi tersebut. Kedua, mengenai surat kabar Sin Tit Po yang menjadi media politik salah satunya bagi Partai Tionghoa Indonesia. Karena surat kabar ini merupakan surat kabar yang vokal dalam pemberitaannya. Ketiga, keterlibatan dua tokoh Marga Tan yaitu Tan Ping Tjiat dan Tan Ling Djie yang menganut “sayap kiri” dengan bergabung dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bab IV ialah penutup yang berisi kesimpulan secara keseluruhan apa yang dapat dan dipelajari dari penelitian tersebut secara ringkas dan jelas.